

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN DAN KETERBATASAN  
MEKANISME PENGAWASAN PARLEMEN TERHADAP  
KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Nurhayani**

**2011102432011**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN DAN KETERBATASAN  
MEKANISME PENGAWASAN PARLEMEN TERHADAP  
KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Disusun Oleh:**

**Nurhayani**

**2011102432011**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

## **MOTTO**

“Hidup bagaikan menaiki sepeda, untuk menjaganya tetap seimbang, anda harus terus bergerak”

“’Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Rad ayat 11)

“Jangan biarkan ayam jantan lebih pandai darimu. Ia berkokok di waktu subuh sedangkan engkau tetap lelap dalam tidur ”(Lukman Hakim)

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS ANALISIS KEKUATAN DAN  
KETERBATASAN MEKANISME PENGAWASAN  
PARLEMEN TERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM  
SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**Nurhayani**

**2011102432011**

**Disetujui untuk diujikan**

**Pada tanggal Juli 2024**

**Pembimbing**



**Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M. Hum**

**NIDN. 1021028501**

**Mengetahui,**

**Koordinator Skripsi**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**

**NIDN. 1102059401**

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS ANALISIS KEKUATAN DAN  
KETERBATASAN MEKANISME PENGAWASAN  
PARLEMEN TERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM  
SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

SKRIPSI

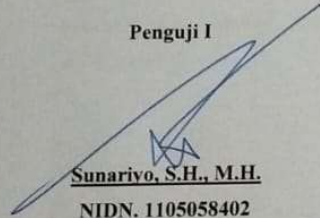
Diajukan oleh:

Nurhayani

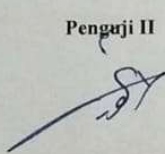
2011102432011

Diseminarkan dan Diujikan  
Pada tanggal Juli 2024

Penguji I

  
Sunarivo, S.H., M.H.  
NIDN. 1105058402

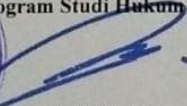
Penguji II

  
Assoc. Prof. Dr. Elviandri., S.HL., M. Hum  
NIDN. 1021028501

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Hukum

  
  
Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.  
NIDN.1112068301

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayani

NIM : 2011102432011

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Analisis Kekuatan Dan Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 18 Juli 2024



buat pernyataan

Nurhayani

2011102432011

v

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Program Studi S1 Hukum.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini sehingga selesai tersusun.

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh dosen dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah membagikan ilmu dan memberikan pelayanan selama menimba dibangku perkuliahan.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.H., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri., S.HI., M. Hum. Selaku pembimbing, yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi mulai dari awal sampai akhir penyelesaian Skripsi ini.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Orangtuaku yaitu Bapak Jafar dan Ibu Mulyati yang tercinta dan saudara-saudaraku yang telah banyak memberikan dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum kelas malam angkatan 2020 yang selama ini bersama-sama berjuang dibangku perkuliahan, memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Diantara nya Muhammad Dody Afriyansyah, Aswin zulfahmi, Belya Ika Wulandari, Nurul Hikmah, Kumala Sari, Annisa Islamia, Hani Pratiwi, Nur Hafisah, Helma Niasaputri Maulidha Eka Pratiwi, yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

## ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan mengendalikan kegiatan eksekutif dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan konstitusi dan keinginan rakyat. Konsolidasi kekuasaan ini memperluas kekuasaan presiden hingga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan keterbatasan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial di Indonesia, dan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia dalam konteks sistem presidensial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber dan jenis data penelitian ini adalah sumber data sekunder. Metode analisis data bersifat kualitatif dan metode kesimpulan bersifat induktif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa DPR memiliki kewenangan tentang pengawasan terhadap eksekutif namun ada kendala-kendala seperti kendala politik, kendala hukum, kendala institusional, kendala informasi, kendala waktu, independen dan transparan. Adapun keterbatasan pengawasan terhadap eksekutif adalah kekuasaan terpusat, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, pengaruh politik, dan kurangnya penegakan hukum. Sedangkan sistem pengawasan parlemen yang ideal untuk konstitusi Indonesia adalah check and balance yang kuat, transparansi dan akses informasi, penguatan peran masyarakat sipil, serta peningkatan kapasitas dan sumber daya pengawas.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Parlemen, Eksekutif.



## ***ABSTRACT***

*The House of Representatives (DPR) as the legislative body has the authority to control the activities of the executive and ensure that policies are in accordance with the constitution and the wishes of the people. This consolidation of power expands the powers of the president to include legislative and judicial functions, although in principle no state institution is the centre of power. This study aims to determine the strengths and limitations of parliamentary oversight mechanisms on executive policies in the presidential system in Indonesia, and parliamentary oversight mechanisms on executive policies in Indonesia in the context of the presidential system. The research method used is normative juridical. The sources and types of data in this research are secondary data sources. The data analysis method is qualitative and the conclusion method is inductive. The results of the research obtained that the DPR has the authority to supervise the executive but there are constraints such as political constraints, legal constraints, institutional constraints, information constraints, time constraints, independence and transparency. The limitations of oversight of the executive are centralised power, lack of transparency, limited resources, political influence, and lack of law enforcement. Meanwhile, the ideal parliamentary oversight system for the Indonesian constitution is a strong check and balance, transparency and access to information, strengthening the role of civil society, and capacity building.*

**Keywords:** *Oversight, Parliament, Executive.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1 Latar Belakang Masalah .....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Keaslian penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Sistem Presidensial .....	15
2.2. Mekanisme Pengawasan Parlemen .....	21
2.3 Kasus-Kasus Pengawasan Parlemen Terhadap Eksekutif Di Indonesia.....	30
BAB III PEMBAHASAN .....	37
3.1 Kekuatan dan Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif Dalam Sistem Presidensial di Indonesia .....	37
1. Kekuatan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif .....	37

2. Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif .....	39
3.2 Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif di Indonesia Dalam Konteks Sistem Presidensial .....	43
1. Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif .....	43
2. Kebijakan Eksekutif Di Indonesia Dalam Konteks Sistem Presidensial .....	46
BAB IV PENUTUP .....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN.....	62